BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi kini memegang peranan yang sangat dominan dalam organisasi. Bahkan dapat dikatakan siapa yang memiliki dan menguasai informasi dengan lengkap secara nasional, internasional, maka organisasi tersebutlah yang terkaya di dunia. Tanpa adanya informasi yag berkualitas, para manajer, karyawan, dan anggota-anggota organisasi lainnya tidak dapat mengambil keputusan yang efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Gaol: 2008).

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau yang akan datang (Mardi, 2011). Sedangkan data adalah deretan fakta-fakta yang menggambarkan kejadian yang terjadi dalam organisasi lingkungan fisik sebelum diorganisasi atau diatur ke dalam bentuk yang dapat dimengerti dan digunakan orang (Laudon: 2004).

Selanjutnya menurut Mc. Leod (2004) informasi dikatakan berkualitas apabila memiliki ciri-ciri yaitu seperti akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Yang dimaksud informasi yang akurat adalah informasi harus tepat dan andal, bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pemakai informasi. Kemudian informasi yang berkualitas adalah informasi lengkap yaitu informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada data fakturnya. Informasi yang relevan adalah informasi

yang berkaitan dengan sejauh mana informasi tersebut dapat membuat perbedaan untuk alternatif pengambilan keputusan. Selanjutnya informasi yang tepat waktu adalah informasi yang harus tersedia pada saat dibutuhkan kareana berhubungan dengan pengambilan keputusan atau kebijakan (George and William: 2001).

Pada organisasi publik informasi juga sangat diperlukan, yaitu informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik (Meutiah, 2002:151). Tetapi pada praktiknya, kualitas informasi sektor publik di Indonesia belum baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil audit BPK bahwa dari total 84 kemente-rian/lembaga (K/L) dan 466 pemerintah daerah, baru 53 K/L dan 32 pemda yang laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (Boediono : 2011). Inti dari pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah ketertiban dalam penggunaan uang negara sebagai basis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan (*good governance*). Oleh karena itu (permasalahan) ini harus dituntaskan (Boediono : 2011).

Kemudian sistem perpajakan melalui teknologi informasi dalam sistem informasi d DJP masih menunjukan hasil informasi yang kurang optimal. Hal ini ditunjukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang masih menemukan 12 ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008. Dalam hasil pemeriksaan tersebut BPK mencatat masih ada sebagian departemen penting masih memiliki opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Memeberikan Pendapat (TMP) dalam hasil audit laporan keuangannya (Hanif Wibisono :2009).

Kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Menurut George and William (2001) dengan adanya sistem yang baik diharapkan dapat menghasilkan suatu informasi yang berkualitas tinggi. Diperlukan adanya sistem informasi yang cerdas dan terpadu serta mampu mengolah data terdistribusi pada jaringan komputer yang luas dengan dukungan teknologi (Marimin, dkk: 2006).

Diterapkannya Sistem Informasi Direktorat jederal Pajak (SIDJP) khususnya dalam hal yang berkaitan dengan informasi akuntansi yaitu Program Aplikasi Modul Negara (MPN), informasi penerimaan pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dihasilkan belum menunjukan kualitas yang baik dalam hal ketepatan waktu. Hal ini di tunjukan dengan Program Aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) di KPP yang kemudian tersentralisasi di kantor pusat memiliki kendala kelambatan perolehan informasi yang diperlukan. Hal ini disebabkan oleh sistem informasi yang lambat (R. Dhias Prayoga :2012).

Kualitas informasi memiliki hubungan positif dengan proses adopsi SIA karena kualitas informasi memainkan peran penting dalam proses implementasi SIA. Ini menunjukkan bahwa organisasi harus memberikan perhatian khusus pada kualitas informasi melalui penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang baik. Hal ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja serta membantu organisasi untuk membuat keuntungan (Wongsim and Gao : 2011).

Sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para

penggunaanya. Sistem informasi didekomposisikan menjadi berbagai subsistem dasar yang salah satunya adalah Sistem Informasi Akuntansi (Hall:2007). Penerapan SIA memegang peranan yang sangat penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas, karena penerapan sistem informasi akuntansi dapat memastikan pengambilan keputusan yang lebih baik, sistem pengendalian internal yang lebih baik, memfasilitasi proses transaksi keuangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Sajadi, et all: 2008).

Agar peranan tersebut dapat tercapai, maka perusahaan harus memperhatikan penerapan sistem informasi akuntansi dalam perusahaannya (Krismiaji, 2002:13). Sistem informasi akuntansi berperan penting dalam memudahkan manajemen mengelola perusahaan. Sistem informasi akuntansi tidak hanya digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi saja, namun sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan manajemen untuk melaksanakan bisnis utama perusahaan (Mulyadi, 2001:31).

SIA dapat di definisikan sebagai kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan (Azhar Susanto:2004). Maka dengan adanya sistem informasi akuntansi yang berkualitas maka bisnis perusahaan akan berjalan dengan baik, karena informasi yang dihasilkan juga berkualitas.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki sistem informasi yang dikembangkan adalah sistem informasi akuntansi yaitu Program Aplikasi Monitoring Pelaporan

dan Pembayaran Pajak (MP3) yang sekarang digantikan oleh Modul Penerimaan Negara (MPN) dan Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva (SIKKA). Sistem ini adalah suatu sistem yang terstruktur untuk mengatur penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara (SE – 24/PJ/2010)

Pada kenyataannya, sistem informasi akuntansi pada organisasi publik belum meunjukkan berkualitas. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan bahwa kualitas informasi yang buruk dipengaruhi oleh implementasi Sistem Informasi Akuntansi. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi dapat menyebabkan pengambilan keputusan oleh manajer, yang lebih baik dan sistem pengendalian internal lebih efektif, serta peningkatan kualitas laporan keuangan dan memfasilitasi proses transaksi keuangan (Sabherwal et al:2006).

Kualitas Informasi menjadi salah satu perhatian khusus bagi Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat memonitor dan mengawasi penerimaan pajak secara *on-line* melalui sistem Modul Penerimaan Negara, dimana masih ada kelemahan dalam sistem tersebut (Darmin Nasution, 2007). Fenomena mengenai sistem informasi akuntasi juga terdapat di KPP Pratama yaitu pada saat diperlukan laporan tidak dapat diterima pada saat itu pun, data-data yang diperlukan belum lengkap karena aplikasi yang satu dengan yang lain nyah tidak terintegrasi (R. Dhias Prayoga :2012).

Menurut Azhar Susanto Sistem Informasi Akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari subsistem atau komponen baik fisik maupun

non fisik yang saling berhubungan dan bekerja satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Komponen yang termasuk di dalam sistem informasi akuntansi terdiri dari *hardware*, *software*, *brainware*, prosedur, *database* dan jaringan komunikasi. *Hardware* terbagi kedalam beberapa bagian seperti bagian input, bagian pengolahan atau procesor dan memori, bagian output dan bagian komunikasi. Bagian dari *hardware* tersebut satu sama lain harus berhubungan dan bekerjasama secara harmonis atau berintegrasi membentuk *hardware* sistem informasi akuntansi. *Hardware* yang digunakan untuk sistem informasi akuntansi harus juga sesuai atau harmonis dengan kebutuhan sistem informasi akuntansi yang diterapkan dan kemampuan keuangan perusahaan (Azhar Susanto : 2004).

Brainware adalah ‘orang’ yang memiliki, membangun dan menjalankan sistem informasi akuntansi (Azhar Susanto, 2004:85). Prosedur adalah rangkaian aktivitas yang menghubungkan aktivitas satu dengan aktifitas lainnya. Dalam sistem informasi akuntansi atau pengolahan transaksi prosedur mengatur langkah-langkah yang dilakukan dalam siklus pengolahan transaksi. Antara prosedur satu dan prosedur yang lainnya harus terjalin kerjasama yang harmonis atau bersinergi. Jangan sampai satu prosedur berjalan sendiri dan tidak terkait dengan prosedur yang lain (Azhar Susanto, 2004:90). *Database* dalam arti luas merupakan data-data yang ada di perusahaan sedangkan dalam arti sempit *database* merupakan data-data yang ada dalam komputer. Data-data dalam *database* (arti sempit) satu sama lain harus berhubungan secara harmonis atau berintegrasi. Integrasi yang terjadi tergantung informasi apa yang diperlukan (Azhar Susanto, 2004:91).

Jaringan telekomunikasi (*network*) disebut juga sebagai jaringan komunikasi data. Pada dasarnya merupakan penggunaan media elektronik atau sinar untuk memindahkan data dari satu lokasi ke satu atau beberapa lokasi lain. Komponen-komponen yang digunakan dalam jaringan komunikasi data satu sama lain harus berintegrasi secara harmonis atau bersinergi membentuk jaringan komunikasi dalam sistem informasi akuntansi (Azhar Susanto, 2004:92).

Masih menurut Azhar Susanto (2004:84) *Software* adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu. *Software* terbagi 2 kelompok besar yaitu *software* sistem dan *software* aplikasi. *Software* sistem terbagi lagi ke dalam beberapa kelompok yaitu sistem operasi, interpreter dan kompiler. Sedangkan *software* aplikasi terbagi ke dalam beberapa jenis software tergantung aplikasi yang akan digunakan. Semua *software* di atas harus dapat terintegrasi secara harmonis (bekerja dengan baik).

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Sumedang berdasarkan survey pendahuluan, mengenai *hardware* belum sesuai dengan kebutuhan user. Masalah yang terjadi pada *software* adalah selalu bermasalah dengan virus dan aplikasinya masih terdapat adanya *stand alone* (R. Dhias Prayoga: 2012).

Penerapan dan pengembangan sistem informasi di setiap organisasi guna mecapai tujuan yang diharapkan tidak terlepas dari keterlibatan dukungan manjaemen puncak (Sadatamrul: 2004). Manajemen puncak dalam organisasi harus mendapatkan pengetahuan tentang kualitas informasi yang tepat dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansi guna meningkatkan kinerja serta membantu organisasi untuk membuat keuntungan (Rajiv Sabherwal, Anand

Jeyaraj, Charles Chowa:2006). Manajemen puncak pada perusahaan harus mengetahui dan memahami secara penuh mengapa perusahaan mengadopsi sistem informasi yang baik, karena akan berhubungan erat dengan strategi yang digunakan untuk meningkatkan daya saing perusahaan (Kim:2007).

Sistem informasi akuntansi mempunyai peran penting dalam menyediakan informasi bagi perusahaan/organisasi terutama mengenai informasi laporan keuangan dibutuhkan oleh berbagai macam pihak yang berkepentingan, terutama pihak-pihak luar perusahaan seperti pemerintah, dan pihak yang memerlukan informasi. Untuk mencapai keberhasilan sistem sangat diperlukan peningkatan komitmen dari manajemen sekaligus keterlibatan manajemen sekaligus pemakai dalam upaya pengembangan sistem informasi, sehingga pemakai dapat menerima dan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan dan akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pemakai (Elfreda Aplonia :2004).

Dukungan manajemen dalam pengembangan sistem informasi akuntansi dapat berupa bentuk berkomitmen pada waktu, biaya, dan sumber daya untuk mendukung pengembangan sistem informasi agar terjadi kemitraan pada jangka panjang dan perusahaan juga dapat berlangsung berproses secara stabil. Salah satu hal yang penting bagi manajemen puncak dalam menjalankan bisnis adalah harus dapat selalu mengembangkan dan menciptakan satu nilai bagi perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja organisasi (Chen dan Paulraj :2004).

Top manajemen merupakan pihak yang bertanggungjawab atas penyediaan pedoman umum bagi kegiatan sistem informasi dalam organisasinya. Tingkat dukungan yang diberikan oleh manajemen puncak bagi sistem informasi

organisasi dapat menjadi suatu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan semua kegiatan yang berkaitan dengan sistem informasi (Hasmi:2004). Fenomena mengenai kurangnya dukungan manajemen terlihat masih banyaknya pegawai yang belum dapat mengoperasi komputer (R. Dhias Prayoga:2012).

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Dukungan Manajemen Terhadap Sistem Informasi Akuntansi Dan Implikasinya Pada Kualitas Informasi" (Survey Pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1).**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. Dukungan manajemen puncak yang belum optimal pada pengembangan sistem informasi akuntansi dikarenakan tidak semua pegawai dapat mengoperasikan komputer.
2. Teknologi jaringan yang lambat mengakibatkan sistem informasi akuntansi tidak tersedia pada saat itu pun.
3. Sofware MPN di KPP seringkali tidak dapat digunakan ketika kantor pusat sedang melakukan *maintenance* (pemeliharaan).
4. Keakuratan sistem informasi yang diperlukan agar mencapai tingkat kualitas informasi belum mencapai harapan

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, timbul beberapa pertanyaan yang merupakan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Dukungan Manajemen Puncak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1
2. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1
3. Bagaimana Kualitas Informasi yang dihasilkan KPP di Kanwil Jawa Barat 1
4. Seberapa Besar Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan Implikasinya pada Kualitas Informasi pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini untuk mengumpulkan data dan informasi yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini adalah Dukungan Manajemen Puncak, Sistem Informasi Akuntansi, dan Kualitas Informasi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Dukungan Manajemen Puncak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1
2. Untuk mengetahui Sistem Informasi Akuntansi KPP di Kanwil Jawa Barat 1
3. Untuk mengetahui Kualitas Informasi yang dihasilkan KPP di Kanwil Jawa Barat 1
4. Untuk mengetahui Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan Implikasinya pada Kualitas Informasi KPP KPP di Kanwil Jawa Barat 1 secara persial.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan Implikasinya pada Kualitas Informasi KPP di Kantor Wilayah Jawa Barat 1.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

   Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambahkan pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung mengenai Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan Implikasinya pada Kualitas Informasi KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

2. Bagi Instansi

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dari sisi akademis mengenai Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan Implikasinya pada Kualitas Informasi KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

3. Bagi Peneliti Lain

   Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan Implikasinya pada Kualitas Informasi KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1

Tabel 1.1
Lokasi Penelitian

No	Nama KPP	Alamat
1.	KPP Pratama Bandung Karees	Jl. Ibrahim Adjie No. 372
2.	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta N0.781
3.	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jl. Soekarno Hatta No. 216
4.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No. 19-21
5.	KPP Pratama Bandung Bojonegara	Jl. Ir. Sutami No. 1
6.	KPP Pratama Bandung Cimahi	Jl. Amir Mahmud No.574
7.	KPP Pratama Bandung Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205
8.	KPP Pratama Bandung Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie No.372
9.	KPP Pratama Bandung Majalaya	Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan
10.	KPP Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No.114

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012.

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012	Agust 2012
I	**Tahap Persiapan :**					
	1.Membuat outline dan proposal UP	■				
	2.Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■
	3.Mengambil formulir penyusunan UP		■			
	4.Menentukan tempat penelitian		■			
II	**Tahap Pelaksanaan :**					
	1.Mengajukan outline dan proposal Up		■			
	2.Meminta surat pengantar ke Kanwil DJP Jabar I			■		
	3.Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak			■	■	
	4.Penyusunan skripsi				■	
III	**Tahap Pelaporan :**					
	1.Menyiapkan draft skripsi				■	■
	2.Sidang akhir skripsi				■	
	3.Penyempurnaan laporan skripsi					■
	4.Penggandaan skripsi					■